

KERUNTUHAN POLITIK DINASTI KELUARGA YASIN DI KABUPATEN BOGOR: ANALISIS NEO-PATRIMONIALISME DAN KLIENTELISME BERBASIS KYAI

Sasqhia Laillyah Kisbiyah, Brilian Danu Nurkhairi, Muhammad Ikhfan Ananta, Ridwan, Teddy Chrisprimanata Putra

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available online Juni 2026

Email:

2410413053@mahasiswa.upnvj.id,

2410413056@mahasiswa.upnvj.id,

2410413070@mahasiswa.upnvj.id,

ridwan.fisip@upnvj.ac.id,

teddycpuutra@upnvj.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Politik dinasti merupakan salah satu fenomena yang berkembang dalam dinamika politik lokal Indonesia pasca-desentralisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana politik dinasti Keluarga Yasin di Kabupaten Bogor dibangun melalui praktik neo-patrimonialisme dan klientelisme berbasis kyai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan dominasi politik keluarga tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan teknik online desk research. Data diperoleh dari artikel jurnal, buku, dokumen resmi, regulasi, dan pemberitaan media yang kredibel, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi politik Keluarga Yasin dibangun melalui jaringan patronase yang melibatkan elite politik, birokrasi, partai politik, serta dukungan tokoh agama sebagai sumber legitimasi politik. Keruntuhan politik dinasti dipengaruhi oleh melemahnya legitimasi akibat kasus hukum, perubahan perilaku pemilih, meningkatnya akses informasi politik, dan perubahan konfigurasi elite politik lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik neo-patrimonialisme dan klientelisme berbasis kyai tidak selalu mampu mempertahankan dominasi politik ketika dihadapkan pada perubahan sosial dan politik dalam demokrasi lokal.

Kata Kunci: politik dinasti, neo-patrimonialisme, klientelisme berbasis kyai, Kabupaten Bogor.

Abstract

Political dynasties are one of the phenomena that have emerged in Indonesia's local political dynamics following decentralization. This study aims to analyze how the Yasin family's political dynasty in Bogor Regency was established through practices of neo-patrimonialism and kyai-based clientelism, as well as to identify the factors that led to the collapse of the family's political dominance. The study employs a qualitative approach using a case study design and online desk research techniques. Data were obtained from journal articles, books, official documents, regulations, and credible media reports, and were then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model. The results indicate that the Yasin family's political dominance was built through a patronage network involving political elites, the bureaucracy, political parties, and the support of religious figures as a source of political legitimacy. The political collapse of the dynasty was influenced by a weakening of legitimacy due to legal cases, changes in voter behavior, increased access to political information, and shifts in the configuration of the local political elite. This study demonstrates that practices of neo-patrimonialism and kyai-based clientelism are not always capable of maintaining political dominance when confronted with social and political changes within local democracy.

Keywords: dynastic politics, neo-patrimonialism, kyai-based clientelism, Bogor Regency.

PENDAHULUAN

Demokrasi lokal di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca-Reformasi. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan mampu memperkuat partisipasi politik masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta mendorong terciptanya kompetisi politik yang lebih demokratis. Namun, di balik tujuan tersebut, desentralisasi juga melahirkan berbagai konsekuensi yang tidak diharapkan, salah satunya adalah menguatnya praktik politik dinasti di berbagai daerah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral tidak selalu berjalan seiring dengan prinsip persaingan politik yang terbuka dan meritokratis (Mukhlis et al., 2024).

Politik dinasti merupakan praktik pewarisan atau konsolidasi kekuasaan politik dalam lingkup keluarga melalui pemanfaatan sumber daya politik, ekonomi, maupun sosial untuk mempertahankan dominasi kekuasaan. Di Indonesia, fenomena ini berkembang di berbagai daerah sebagai dampak dari lemahnya kaderisasi partai politik, tingginya personalisasi kekuasaan, serta terbukanya peluang bagi kerabat petahana untuk mengikuti kontestasi politik. Data Perludem (2020) mencatat sedikitnya 117 kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki hubungan kekerabatan politik pada Pilkada 2015-2018. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan larangan politik dinasti semakin membuka ruang reproduksi kekuasaan dalam lingkup keluarga (Dewi, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik dinasti masih menjadi tantangan dalam konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia.

Keberlangsungan politik dinasti tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, tetapi juga oleh praktik neo-patrimonialisme dan klientelisme. Menurut Eisenstadt (1973), neo-patrimonialisme menggambarkan situasi ketika institusi politik modern tetap berjalan secara formal, tetapi praktik kekuasaan masih didominasi oleh hubungan personal, patronase, dan loyalitas individu. Dalam konteks Indonesia, hubungan patron-klien berkembang melalui jaringan elite politik, birokrasi, partai politik, maupun tokoh masyarakat yang berperan sebagai penghubung antara elite dan pemilih (Aspinall & Berenschot, 2019). Komarudin dan Pramuji (2023) juga menjelaskan bahwa praktik klientelisme di Indonesia lebih banyak berlangsung melalui distribusi sumber daya dan hubungan patronase dibandingkan penggunaan kekerasan, sehingga mampu mempertahankan dominasi elite politik dalam kontestasi lokal.

Pada daerah dengan basis masyarakat religius, praktik klientelisme tidak hanya dibangun melalui pertukaran material, tetapi juga melalui legitimasi yang diberikan oleh tokoh agama. Kyai memiliki posisi strategis karena otoritas moral dan pengaruh sosial yang dimilikinya mampu membentuk preferensi politik masyarakat. menunjukkan bahwa modal sosial dan religius yang dimiliki elite pesantren dapat ditransformasikan menjadi modal politik untuk membangun serta mempertahankan dinasti politik. Temuan Azizah (2023) juga memperlihatkan bahwa kyai sering berperan sebagai political broker yang menghubungkan elite politik dengan masyarakat melalui jaringan sosial-keagamaan. Dengan demikian, relasi patron-klien dalam politik lokal tidak hanya bersifat material, tetapi juga memperoleh legitimasi melalui otoritas keagamaan.

Salah satu contoh yang mencerminkan dinamika tersebut dapat ditemukan pada politik lokal di Kabupaten Bogor melalui dominasi politik Keluarga Yasin. Selama lebih dari satu dekade, keluarga ini berhasil mempertahankan pengaruh politik melalui dukungan partai politik, jaringan birokrasi, hubungan patronase, serta kedekatan dengan berbagai tokoh agama. Akan tetapi, dominasi tersebut mengalami kemunduran setelah munculnya kasus hukum yang menjerat Rachmat Yasin, disertai perubahan konfigurasi elite politik lokal dan meningkatnya rasionalitas pemilih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik neo-patrimonialisme dan klientelisme tidak selalu mampu mempertahankan kekuasaan politik ketika terjadi perubahan sosial maupun politik di tingkat lokal.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas politik dinasti dari beragam perspektif. Meliala dan Permana (2023) menjelaskan kegagalan Dinasti Yasin Limpo di Sulawesi Selatan akibat konflik internal keluarga dan melemahnya dukungan elite politik. Huda dan Jamil (2023) menyoroti dampak politik dinasti terhadap degradasi demokrasi lokal, sedangkan Mukhlis et al. (2024) lebih menekankan aspek regulasi dalam pembatasan politik dinasti. Di sisi lain, Azizah et al. (2021) mengkaji pemanfaatan kapital religius dalam memperkuat dinasti politik berbasis pesantren. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menghubungkan neo-patrimonialisme, klientelisme berbasis kyai, dan keruntuhan politik dinasti dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas, terutama pada kasus Kabupaten Bogor. Sebagian besar

penelitian lebih berfokus pada faktor-faktor yang mendukung keberlangsungan politik dinasti, sementara kajian mengenai penyebab melemahnya dominasi dinasti akibat perubahan hubungan patron-klien dan perilaku pemilih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik dinasti Keluarga Yasin di Kabupaten Bogor dibangun melalui praktik neo-patrimonialisme dan klientelisme berbasis kyai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan dominasi politik keluarga tersebut dalam dinamika politik lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Neo-Patrimonialisme dalam Politik Lokal

Neo-patrimonialisme merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana institusi politik modern tetap dipengaruhi oleh praktik-praktik kekuasaan yang bersifat personal dan informal. Konsep ini berakar dari gagasan patrimonialisme Max Weber (1968), yang memandang bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan loyalitas pribadi kepada pemimpin, bukan atas dasar aturan legal-rasional. Selanjutnya, Eisenstadt (1973) mengembangkan konsep tersebut menjadi neo-patrimonialisme, yaitu suatu kondisi ketika struktur birokrasi dan lembaga demokrasi modern tetap berfungsi secara formal, tetapi dalam praktiknya dikendalikan oleh hubungan patronase, loyalitas personal, dan distribusi sumber daya untuk mempertahankan kekuasaan.

Dalam konteks politik lokal, neo-patrimonialisme sering kali ditandai dengan dominasi elite tertentu yang memanfaatkan jabatan publik, jaringan keluarga, dan kedekatan sosial untuk mengonsolidasikan pengaruh politik. Menurut van Klinken dan Barker (2009), dinamika politik lokal di Indonesia kerap memperlihatkan bahwa kompetisi politik lebih dipengaruhi oleh koalisi elite berbasis keluarga dan jaringan sosial daripada persaingan programatik. Oleh karena itu, pendekatan neo-patrimonialisme menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana politik dinasti dapat dibangun dan dipertahankan melalui hubungan personal yang melekat pada struktur politik formal.

2.2 Klientelisme Berbasis Kyai dan Politik Dinasti

Hubungan patron-klien merupakan salah satu mekanisme utama dalam praktik neo-patrimonialisme. Scott (1977) dan Roniger (1990) menjelaskan bahwa hubungan patron-klien merupakan relasi timbal balik yang bersifat asimetris antara pihak yang memiliki sumber daya politik dan ekonomi dengan pihak yang memberikan dukungan serta loyalitas. Dalam praktik politik lokal, hubungan tersebut tidak selalu diwujudkan melalui pertukaran material, tetapi juga dapat memanfaatkan modal sosial dan simbolik yang dimiliki oleh aktor tertentu.

Pada masyarakat yang memiliki basis religius kuat, tokoh agama, khususnya kyai, sering menjadi aktor strategis dalam mobilisasi politik. Otoritas moral dan pengaruh sosial yang dimiliki kyai dapat memberikan legitimasi terhadap kandidat atau kelompok politik tertentu. Kondisi tersebut melahirkan pola klientelisme berbasis kyai, yaitu praktik pertukaran dukungan politik yang memanfaatkan jaringan sosial-keagamaan sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks politik dinasti, dukungan dari tokoh agama dapat memperkuat posisi elite lokal dengan membangun loyalitas politik yang tidak hanya didasarkan pada hubungan material, tetapi juga pada kedekatan kultural dan religius.

Perkembangan politik kontemporer menunjukkan bahwa efektivitas praktik klientelisme tradisional mulai menghadapi tantangan akibat meningkatnya kesadaran politik masyarakat dan perubahan perilaku pemilih. Kitschelt dan Wilkinson (2007) menjelaskan bahwa hubungan klientelistik dapat mengalami transformasi seiring dengan berkembangnya pola dukungan politik yang lebih rasional dan programatik. Dalam penelitian ini, konsep neo-patrimonialisme dan klientelisme berbasis kyai digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana politik dinasti Keluarga Yasin dibangun dan dipertahankan, sekaligus menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya dominasi politik keluarga tersebut dalam pemilu lokal di Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika politik dinasti Keluarga Yasin di Kabupaten Bogor. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena politik secara kontekstual dan interpretatif, khususnya mengenai bagaimana praktik neo-patrimonialisme dan klientelisme berbasis kyai membentuk serta mempertahankan kekuasaan politik, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kemundurannya. Adapun studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu fenomena spesifik, yaitu perkembangan dan keruntuhan politik dinasti Keluarga Yasin dalam rentang waktu 2008-2024.

Penelitian ini menggunakan teknik *online desk research* dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), regulasi perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pemberitaan media massa yang kredibel. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), yang meliputi proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai data dan referensi yang relevan.

HASIL & PEMBAHASAN

4.1 Politik Dinasti Keluarga Yasin dalam Perspektif Neo-Patrimonialisme dan Klientelisme Berbasis Kyai

Politik dinasti Keluarga Yasin di Kabupaten Bogor berkembang seiring menguatnya posisi Rachmat Yasin yang menjabat sebagai Bupati Bogor selama dua periode (2008-2014). Posisi tersebut tidak hanya memberikan kewenangan formal dalam pemerintahan daerah, tetapi juga memperluas kapasitas keluarga dalam membangun jaringan politik melalui partai politik, birokrasi, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Dalam perspektif neo-patrimonialisme, kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan formal tidak dijalankan semata-mata berdasarkan mekanisme legal-rasional, melainkan diperkuat melalui hubungan personal, loyalitas politik, dan patronase sebagaimana dijelaskan oleh Eisenstadt (1973).

Praktik tersebut tampak dari kemampuan Keluarga Yasin mempertahankan pengaruh politik melalui jaringan elite lokal yang telah dibangun selama masa kepemimpinan Rachmat Yasin. Hubungan antara elite politik, birokrasi, dan partai politik menciptakan pola patron-klien yang saling menguntungkan. Patron memperoleh dukungan politik yang berkelanjutan, sedangkan klien memperoleh akses terhadap sumber daya, jabatan, maupun kesempatan politik. Temuan ini sejalan dengan Berenschot dan Aspinall (2019) yang menjelaskan bahwa karakter klientelisme di Indonesia cenderung bersifat *community-centred*, yakni hubungan patronase lebih banyak dibangun melalui jaringan sosial lokal dibandingkan institusi partai yang kuat.

Selain melalui patronase politik, dominasi Keluarga Yasin juga diperkuat oleh pemanfaatan modal sosial dan religius. Kabupaten Bogor memiliki karakter masyarakat yang

masih menempatkan tokoh agama sebagai figur yang dihormati dalam kehidupan sosial maupun politik. Kondisi tersebut menjadikan kyai tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai aktor yang mampu memengaruhi preferensi politik masyarakat. Dukungan dari jaringan kyai memberikan legitimasi moral terhadap kepemimpinan politik sehingga memperkuat penerimaan masyarakat terhadap keberadaan dinasti politik.

Fenomena tersebut sesuai dengan temuan Azizah et al. (2021) yang menunjukkan bahwa modal religius dapat dikonversi menjadi modal politik melalui jaringan pesantren dan tokoh agama. Sementara itu, Azizah (2023) menjelaskan bahwa dalam masyarakat religius, kyai sering berperan sebagai political broker yang menjembatani hubungan antara elite politik dengan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Bogor, kedekatan Keluarga Yasin dengan berbagai tokoh agama dapat dipahami sebagai bentuk klientelisme berbasis kyai, yaitu hubungan timbal balik yang tidak selalu diwujudkan melalui pemberian material, tetapi melalui pertukaran legitimasi, kepercayaan, dan dukungan politik.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan politik dinasti Keluarga Yasin tidak hanya ditopang oleh hubungan kekerabatan, tetapi juga oleh kemampuan membangun jaringan neo-patrimonial yang menghubungkan elite politik, birokrasi, partai politik, dan tokoh agama. Hubungan patronase yang dibangun melalui jaringan tersebut diperkuat oleh legitimasi religius yang dimiliki para kyai, sehingga dukungan politik tidak hanya bersumber dari distribusi sumber daya, tetapi juga dari kepercayaan sosial yang berkembang di masyarakat.

4.2 Faktor-Faktor Penyebab Keruntuhan Politik Dinasti Keluarga Yasin di Kabupaten Bogor

Meskipun berhasil membangun jaringan kekuasaan yang kuat, dominasi politik Keluarga Yasin pada akhirnya mengalami kemunduran. Berdasarkan hasil analisis berbagai sumber, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan melemahnya pengaruh politik dinasti tersebut, yaitu menurunnya legitimasi akibat kasus hukum, perubahan perilaku pemilih, serta perubahan konfigurasi elite politik lokal.

Faktor pertama adalah menurunnya legitimasi politik akibat kasus hukum yang menjerat Rachmat Yasin. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Bogor tersebut tidak hanya berdampak pada citra pribadi, tetapi juga memengaruhi legitimasi politik keluarga secara keseluruhan. Dalam sistem neo-patrimonial, legitimasi patron merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga loyalitas jaringan pendukung. Ketika patron kehilangan kredibilitas, hubungan patron-klien menjadi semakin lemah karena kemampuan patron dalam mendistribusikan sumber daya maupun mempertahankan pengaruh politik ikut menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas politik dinasti sangat bergantung pada kapasitas elite dalam mempertahankan legitimasi publik.

Faktor kedua adalah perubahan perilaku pemilih. Seiring meningkatnya akses masyarakat terhadap media digital dan informasi politik, pola pilihan masyarakat mengalami perubahan dari yang sebelumnya lebih dipengaruhi loyalitas personal menuju pertimbangan yang lebih rasional. Nurhidayati et al. (2025) menjelaskan bahwa perkembangan media sosial dan meningkatnya akses informasi mendorong pemilih, terutama generasi muda, untuk lebih mempertimbangkan rekam jejak, integritas, dan kapasitas kandidat dibandingkan sekadar mengikuti preferensi tokoh lokal. Perubahan tersebut menyebabkan efektivitas praktik klientelisme tradisional mengalami penurunan karena masyarakat memiliki lebih banyak sumber informasi dalam menentukan pilihan politik.

Faktor ketiga adalah berubahnya konfigurasi elite politik lokal. Keberhasilan suatu dinasti politik sangat bergantung pada kemampuan mempertahankan koalisi dengan partai politik, elite birokrasi, dan kelompok kepentingan lainnya. Ketika terjadi perubahan aliansi politik maupun munculnya elite baru yang mampu menawarkan alternatif kepemimpinan, dominasi dinasti menjadi semakin rentan. Fenomena ini memiliki kesamaan dengan penelitian Meliala dan Permana (2023) mengenai kegagalan Dinasti Yasin Limpo di Sulawesi Selatan yang

menunjukkan bahwa melemahnya dukungan elite partai serta konflik internal menjadi penyebab utama runtuhnya dominasi politik keluarga tersebut.

Selain faktor-faktor tersebut, melemahnya efektivitas klientelisme berbasis kyai juga turut memengaruhi keruntuhan politik dinasti. Walaupun tokoh agama masih memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat, meningkatnya tingkat pendidikan, akses informasi, dan kesadaran politik membuat preferensi pemilih tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh rekomendasi tokoh agama. Otoritas religius tetap memiliki nilai simbolik, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya faktor yang menentukan perilaku memilih. Temuan ini memperlihatkan bahwa hubungan patron-klien berbasis religius mengalami transformasi seiring berkembangnya demokrasi lokal dan meningkatnya rasionalitas politik masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan konsep neo-patrimonialisme, keruntuhan politik Keluarga Yasin menunjukkan bahwa hubungan patronase bersifat dinamis dan tidak selalu mampu mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang. Sebagaimana dijelaskan oleh Berenschot dan Aspinall (2019), keberhasilan klientelisme sangat bergantung pada kemampuan patron mengelola jaringan sosial, sumber daya, dan legitimasi politik. Ketika salah satu unsur tersebut melemah, maka hubungan patron-klien juga mengalami disintegrasi sehingga membuka ruang bagi munculnya elite politik baru.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik dinasti Keluarga Yasin di Kabupaten Bogor dibangun melalui praktik neo-patrimonialisme yang memadukan kekuasaan formal dengan hubungan patronase, jaringan elite politik, birokrasi, dan partai politik. Selain itu, keberlangsungan dinasti turut diperkuat oleh klientelisme berbasis kyai yang memanfaatkan legitimasi sosial dan religius tokoh agama untuk membangun serta mempertahankan dukungan politik masyarakat. Dengan demikian, dominasi politik keluarga tidak hanya bertumpu pada hubungan kekerabatan, tetapi juga pada kemampuan mengelola jaringan patron-klien yang terintegrasi dengan struktur sosial dan keagamaan di tingkat lokal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keruntuhan politik Keluarga Yasin dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kasus hukum yang menjerat elite keluarga mengakibatkan menurunnya legitimasi politik dan melemahnya jaringan patronase yang selama ini menopang kekuasaan. Di sisi lain, perubahan perilaku pemilih yang semakin rasional, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi politik, serta berubahnya konfigurasi elite politik lokal mengurangi efektivitas praktik klientelisme berbasis kyai dalam memobilisasi dukungan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan politik dinasti tidak hanya bergantung pada kekuatan patronase, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang terus berkembang dalam demokrasi lokal.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik neo-patrimonialisme dan klientelisme berbasis kyai masih berperan dalam membentuk serta mempertahankan politik dinasti di tingkat lokal, tetapi efektivitasnya semakin terbatas ketika dihadapkan pada meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan partai politik, peningkatan pendidikan politik masyarakat, serta pengawasan terhadap praktik patronase menjadi aspek penting dalam mendorong terciptanya kompetisi politik yang lebih demokratis dan berbasis meritokrasi di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.

Azizah, N. (2023). Personification of Religious Elite, Political Behavior and Identity Politics: A

- Profile of Regional Elections in Indonesia. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 3(1), 26-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.32996/Ijahs.2023.3.1.4>
- Azizah, N., Nkwede, J. O., & Armoyu, M. (2021). The octopus-like power of Pesantren dynasty in the dynamics of local politics. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1962056. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1962056>
- Dewi, S. H. S. (2021). *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Puu-Xiii/2015 Dikaitkan Dengan Pembatasan Politik Dinasti pada Pemilihan Kepala Daerah* [Universitas Sebelas Maret]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/86717/Pengaruh-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-33Puu-Xiii2015-Dikaitkan-Dengan-Pembatasan-Politik-Dinasti-pada-Pemilihan-Kepala-Daerah>
- Eisenstadt, S. N. (1973). *Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism*. SAGE.
- Huda, A., & Jamil, D. (2023). Degradasi Demokrasi Lokal: Studi Kasus Politik Dinasti Kota Batu. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 5161-5171. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7118>
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, Clients and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge University Press.
- Komarudin, U., & Pramuji, P. (2023). Between Clientelism And Patrimonialism: Local Politics Of The Philippines And Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 8(1), 32-41. <https://journal.unpad.ac.id/wacanapolitik/vol8/iss1/4>
- Meliala, F. C. D., & Permana, P. A. (2023). Competitive Threats to Political Dynasty in Indonesia: The Failure of the Yasin Limpo Family in the 2018 South Sulawesi Gubernatorial Election. *Jurnal Politik*, 9(1), 3-31. <https://doi.org/10.7454/jp.v9i1.1139>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mukhlis, M. M., Ilmar, A., Maskun, Aswanto, & Tajuddin, M. S. (2024). Dynastic Politics in Regional Elections: Challenges to Democracy and the Need for Legal Reform in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 565-587. <https://doi.org/10.31078/jk2143>
- Nurhidayati, S., Ferdiansyah, A., & Wijaya, D. (2025). Perilaku Pemilih dalam Menentukan Pilihan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 8(2), 416-522. <http://www.e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jrktl/article/view/2263>
- Roniger, L. (1990). *Hierarchy and Trust in Modern Mexico and Brazil*. Bloomsbury Academic.
- Scott, J. C. (1977). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Weber, M. (1968). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Volume 1*. Bedminster Press.